PENDAHULUAN BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Iran dan Irak terlibat perang panjang pada tahun 1980-1988 dan setelah itu masih tetap terlibat konflik. Muncul kecurigaan di kalangan Irak bahwa Iran mengembangkan senjata pemusnah massal. Saddam sangat menyadari kemampuan senjata pemusnah massal Iran dan kemudian menciptakan kesan kalau Irak pun memiliki persenjataan itu,"kata Charles Duelfer (Ketua kelompok Survei Dinas Intelijen Pusat (CIA). Iran adalah satu-satunya negara di dunia yang berhasil bertahan dari serangan senjata kimia. Irak berulangkali menyerang Iran dengan menggunakan gas dan zat saraf dalam lima tahun terakhir dari perang antara keduanya, tahun 1980-1988. Data resmi menyebutkan, sebanyak 100.000 personel tentara Irak terkena senjata kimia, dan 10.000 diantaranya meninggal. Dan, yang selamat menderita kerusakan paru-paru, kulit dan mata.²

Pada tahun 1983 tatkala Iran menang dalam perang Irak-Iran, Iran menghimpun gerakan-gerakan Syiah, termasuk Partai Dakwah Islam untuk disatukan dalam Dewan Tinggi Revolusi Islam Irak pimpinan Muhammad Bakir Hakim. Namun, Partai Dakwah Islam kemudian menarik diri dari koalisi tersebut. Mundurnya Partai Dakwah Islam dari koalisi itu disebabkan perbedaan pendapat dengan Iran soal masa depan kepemimpinan Islam di Irak dan hubungannya dengan

www.suaramerdeka.com/harian/0505/26/int03.htm

² www.kompas.com/kompas-cetak/0304/27/In/279614.htm

Iran. Pemerintah Iran saat itu terbentur dengan sentimen nasionalisme Partai Dakwah Islam yang timbul di kalangan aktivis partai tersebut akibat upaya Iran ingin memaksakan doktrin politiknya pada partai Dakwah itu. Krisis hubungan antara Iran dan Partai Dakwah itu turut memperburuk hubungan Partai Dakwah dan Dewan Tinggi Revolusi Islam Irak. Partai Dakwah Islam yang menyerukan berdirinya negara Islam di Irak yang memiliki hubungan buruk dengan Amerika Serikat. Partai tersebut menolak keras tekanan dan dikte politik Amerika Serikat di negeri itu.³

Perjanjian Aljazair 1975 adalah perjanjian tentang hak Iran dan Irak di wilayah perbatasan antara kedua negara. Saddam mengatakan bahwa pemerintah Iran tidak konsekwen kepada perjanjian ini yang dilatarbelakangi oleh faktor imperialisme. Adapun fakta yang tidak bisa ditutupi bahwa agresi militer Irak terhadap Iran pada tahun 1980 hingga 1988 adalah hasil obsesi rezim Baghdad untuk menumbangkan pemerintahan Republik Islam Iran (RII) yang baru berdiri.

Sejak perang Teluk 1990-1991, kaum Syiah Irak menentang kehadiran pasukan Amerika dan barat pada umumnya untuk membunuh Presiden Saddam Hussein. Para pemimpin Syiah Irak menentang invasi militer Saddam Hussein ke Kuwait karena bangsa Kuwait adalah saudara-saudara seiman dan seislam. Negara itu

Invasi Saddam Hussein ke Kuwait pada Agustus 1990 merupakan ancaman serius untuk kepentingan Iran. Tidak hanya penggabungan Irak dan Kuwait, Irak memperoleh jalan masuk ke pelabuhan teluk Persia di Kuwait dan sumber daya keuangan, tetapi itu juga mengilhami massa pendukung Arab popular yang mungkin telah memahkotai kesuksesan Saddam. Lebih dari itu, ketika menginvasi, pasukan Irak masih menduduki wilayah Iran. Dengan keuntungan yang pantas dipertimbangkan peralatan Irak lebih memadai, Iran tidak mempunyai harapan atas kekuatan senjata untuk mengusir Irak. Saddam tampak tidak mau menarik pasukan kecuali jika Iran menyetujui untuk penyerahan kedaulatan atas Shatt al-Arab, jadi membatalkan perjanjian Aljazair 1975 dibawah kedua negara yang menyetujui kedaulatan di atas terusan yang sempit di Irak yang menuju ke Teluk. ⁵

Iran tidak memutuskan sangsi embargo perdagangan PBB malawan Irak. Ketika Saddam mencari tempat aman untuk berlindung militer Irak dan pesawat terbang sipil di lapangan terbang Iran, Iran pura-pura melakukan protes pelanggaran tentang ruang udara dan dengan tenang menerima pesawat terbang, tetapi itu tidak menunjukkan kecenderungan untuk membantu Saddam dengan cara lain. Jika Saddam mengharapkan Iran untuk membujuk untuk mengerem embargo PBB sebelum para pemimpinnya kemungkinan untuk melakukan perjanjian damai yang baik ke Iran sepanjang seluruh krisis Teluk dan sedikitnya sampai terjadi permusuhan, adalah benar: Iran mencari untuk memelihara hubungan baik yang layak

dengan Irak dalam rangka mengajak suatu parjanjian damai. Tetapi dalam isu yang kritis memudahkan penggabungan Irak-Kuwait, kesiapsiagaan Saddam Hussein untuk menawarkan hubungan damai yang baik tidak secara material mengubah posisi Iran. ⁶

Iran menyatakan kenetralan antara dua yang sama "angkuh" dan negara tidak adil, Irak dan Amerika Serikat. Secara rutin mengutuk jumlah dari kehadiran militer Amerika Serikat di Teluk, walaupun Rafsanjani juga berkata bahwa militer itu bertambah ,bagaimanapun tidak disukai, kekuatan dihadapi jika dilayani dengan akhir yang positif. Pemerintah menyatakan perhatian atas lingkup Amerika Serikat dan bergabung membom pusat kota Irak dan menyajikan beberapa bantuan perikemanusiaan, dalam wujud makanan dan persediaan medis ke penduduk sipil Irak. Pada pertengahan perang pada Februari 1991, Rafsanjani berperan sebagai perantara atau penengah antara Irak dan negara-negara sekutunya yang bergerak menyerangnya. 7

Semenjak keberhasilan operasi militer Amerika Serikat (AS) meruntuhkan kekuasaan Taliban di Afghanistan dalam waktu cukup singkat, suara mulai berembus dari Washington tentang kemungkinan Irak menjadi sasaran serangan AS berikutnya. Bahkan, Menlu AS Colin Powell yang dikenal moderat menyangkut persoalan Timur Tengah, ikut angkat suara tentang pentingnya perubahan kekuasaan di Baghdad. Pidato kenegaraan Presiden AS George W Bush di depan Kongres 29 Januari 2002,

semakin meningkatkan kekhawatiran akan dimulainya serangan militer AS ke Irak itu. Atmosfir politik pada awal Oktober 2002 semakin menunjukkan, aksi penyerangan Amerika Serikat atas Irak sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Masalah yang tersisa hanyalah soal taktik dan pemilihan waktu penyerangan saja. Mayoritas anggota Kongres AS dalam voting, Jumat 11 Oktober 2002 yang melukiskan Saddam Hussein sebagai tirani kriminal, dictator pembunuh, dan murid Stalin. Dalam pidato itu, Presiden Bush mengungkapkan, hasil penyidikan intelijen AS dan Inggris melaporkan bahwa Irak memulai lagi memproduksi senjata pemusnah massal. Bush lalu menegaskan, Saddam Hussein harus melucuti semua senjata itu dan jika tidak, maka AS dan sekutunya yang akan melakukannya.

Dalam konteks itu, AS telah berhasil membangun aliansi dengan Inggris, Australia, Italia, Spanyol, Turki, dan sejumlah negara Arab seperti Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, dan Jordania. Negara-negara Arab tersebut telah bersedia memberi fasilitas pangkalan militer pada AS, bila mendapat wewenang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Rangkaian perkembangan politik tersebut, tidak diragukan lagi, menunjukkan hakikat niat AS untuk menyerang Irak dengan dalih kepemilikan Baghdad atas senjata pemusnah massal. Disinyalir, militer AS sudah siap menyerang Irak pada akhir November atau awal Desember 2002. Namun,

pasukan Inggris yang diperkirakan hanya sekitar 10 persen dari jumlah pasukan penyerang itu, baru siap bertempur pada awal tahun 2003.¹⁰

Dan di luar dugaan, hingga hari ketujuh, Irak sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda penggunaan senjata pemusnah massal. Jauh hari sebelum AS benar-benar melaksanakan niatnya menggulingkan Saddam. Orang nomor satu Irak itu sudah mengantisipasi kemungkinan itu dengan baik. Ia seolah tahu persis, negaranya akan menjadi korban selanjutnya setelah AS menyelesaikan Afghanistan.

B. Maksud Dan Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui Sikap Iran terhadap Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003.

C. Pokok Permasalahan

Melihat dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh penulis tersebut diatas maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian dengan pertanyaan sebagai berikut:

"Bagaimana Sikap Iran terhadap Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003?"

D. Kerangka Dasar pemikiran

Untuk menganalisa permasalahan diatas kita memerlukan suatu konsep Politik

Luar Negeri yang dikemukakan oleh K.J. Holsti. Konsep sendiri diartikan sebagai

¹⁰ Ibid., hal. 42.

salah satu symbol paling penting dalam bahasa. Menurut Mochtar Mas'oed konsep sebenarnya merupakan sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan atau fenomena tertentu, bukan fenomena itu sendiri. Ia bukan sesuatu yang asing. Kita menggunakannya sehari-hari untuk melambangkan suatu kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasarkan ciri-cirinya yang relevan bagi kita. 12 Politik Luar Negeri, seperti vang diungkapkan oleh K.J. Holsti, merupakan output dari kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam kebijakan, sikap, atau tindakan negara lain. 13 Selain, politik luar negeri juga mengandung tindakan yang merupakan bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mendukung perilaku negara lain. Hal ini menandai proses politik internasional. Namun, ada perbedaan besar dalam ruang lingkup antara mengirimkan nota diplomatic kepada suatu negara sahabat (suatu tindakan khusus) dan merumuskan apa yang diinginkan suatu bangsa di seluruh dunia dalam jangka panjang. Kita akan membagi gagasan kebijakan luar negeri menjadi empat kimponen, mulai umum hingga yang spesifik: (1) orientasi kebijakn luar negeri, (2) peran nasional, (3) tujuan, dan (4) tindakan. 14

Tingkat keterlibatan suatu negara dalam berbagai bidang isu internasional paling sedikit merupakan suatu ungkapan orientasi umumnya terhadap bagian dunia

¹² Mohtar Mas'oed, *Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal. 93-94.

lain. Yang kita maksudkan dengan orientasi ialah sikap dan komitmen umum suatu negara terhadap lingkungan eksternal dan strategi fundamentalnya untuk mencapai tujuan dalam dan luar negerinya dan untuk menangggulangi ancaman yang berkesinambungan. Strategi atau orientasi umum suatu bangsa jarang diungkapkan dalam suatu keputusan, tetapi merupakan hasil dari serangkaian keputusan kumulatif yang diambil dan karakteristik lingkungan domestik dan eksternal. Dengan mengkaji struktur kekuasaan dan pengaruh serta tindakan unit politik dalam berbagai sistem internasional, kita dapat mengidentifikasikan paling sedikit tiga orientasi fundamental yang telah diterapkan secara berulang, tanpa menghiraukan konteks sejarah. Orientasi itu adalah (1) isolasi, (2) nonblok, (3) pembentukan koalisi dan aliansi. ¹⁵

Secara tradisional ada kerancuan mengenai perbedaan di antara istilah-istilah seperti netralitas, netralisme, dan nonblok. Dalam satu hal, ketiga istilah ini berarti tipe orientasi kebijakan luar negeri yang sama, di mana suatu negara tidak melibatkan kemampuan militer dan, kadang-kadang dukungan diplomatiknya terhadap tujuan-tujuan negara lain. Keengganan melibatkan kemampuan militer terhadap tujuan-tujuan negara lain adalah bukti (resmi) nonblok sebagai suatu strategi kebjakan luar negeri, tetapi ada beberapa variasi dalam beberapa keadaan yang mendorong suatu negara menerapkan kebijakan nonblok; di sinilah netralitas dan netralisme mempunyai makna yang berbeda. Netralitas mengacu pada status hukum suatu negara selama permusuhan bersenjata. Di bawah hukum netralitas internasional, negara yang

kewajiban tertentu yang tidak diberikan pada negara yang berperang (belligerent). Aturan ini, misalnya, mengatakan bahwa suatu negara netral boleh tidak mengizinkan penggunaan wilayahnya sebagai basis operasi militer oleh salah satu negara yang berperang, boleh menggunakan jalur bebas di laut terbuka untuk mengangkut barangbarang nonmiliter dan dalam keadaan tertentu menembus blokade negara-negara yang berperang. Negara netral harus memperhatikan peraturan ini selama konflik bersenjata dan selama masa damai harus pula menahan diri dari pembentukan aliansi militer dengan negara lain. Perbedaan utama antara negara netral dan negara nonblok ialah bahwa negara netral memperoleh kedudukannya berdasarkan tindakan negara lain, sedangkan negara nonblokmemilih orientasinya sendiri dan tidak ada jaminan bahwa posisinya akan dihormati oleh negara lain. 16

Bentuk nonblok yang paling umum dewasa ini dijumpai di antara negarangara yang atas prakarsa sendiri dan tanpa ada jaminan negara lain menolak mengikatkan diri secara militer dengan kepentingan dan tujuan. Meskipun negara nonblok itu memberikan dukungan diplomatiknya kepada blok atau pemimpin blok mengenai isu-isu tertentu, namun mereka tetap menahan diri untuk tidak memihak secara diplomatic pada suatu blok mengenai semua isu. 17

Dengan adanya invasi Amerika Serikat ke Irak pada bulan Maret pada tahun

secara militer dalm perang Irak-AS, meskipun Teheran menolak secara politik dan publikasi serangan militer AS itu. 18

Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan pada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa terjadi, dengan demikian selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar prediksi. Dari pengertian ini secara gambling teori bisa dikatakan sebagai sesuatu pandangan atas persepsi mengenai sesuatu yang terjadi dan akan terjadi. ¹⁹ Untuk menganalisa permasalahan di atas kita memerlukan suatu teori. Adapun teori yang akan digunakan adalah TEORI AKTOR RASIONAL. Tujuannya agar dapat menjelaskan secara teoritis dan memahami persoalan riil sikap Iran terhadap Invasi Amerika ke Irak pada tahun 2003.

Menurut Graham T Allison, Teori Aktor Rasional digambarkan sebgai suatu proses intelektual. Dalam teori ini, para pembuat keputusan (decision maker) diasumsikan selalu bertindak rasional, dimana suatu dibuat secara rasional. Dalam hal ini, peran pembuat keputusan akan selalu mengkalkulasi untung dan rugi atas masingmasing alternatif tersebut menggunakan pertimbangan yang paling rasioanal dengan kriterialebih mengutamakan kepentingan dan optimalisasi hasil.²⁰

Pada tanggal 20 Maret 2003 Amerika Serikat (AS) mulai menyerang atau menginvasi negara Irak. Invasi ini banyak ditentang oleh negara-negara lain di dunia, begitu juga dengan Iran. Karena invasi ini sangat membahayakan dan

¹⁸ Musthafa Abdul Rahman, Geliat Irak Menuju Era Pasca Saddam, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2003, hal. 55-56.

merugikan Iran dan menguntungkan Amerika Serikat. Karena dengan adanya Invasi Amerika ke Irak ada tiga pintu bahaya atas keamanan Iran, yaitu :

Pertama, bahaya keberadaan militer AS dan pengaruh Israel di kawasan Teluk di Tengah terjadinya ketimpangan perimbangan kekuatan yang luar biasa dengan hadirnya pemerintah boneka di Baghdad. Kedua, serangan AS atas Irak akan membentangkan jalan bagi Israel untuk bisa menghancurkan instalasi nuklir Iran kelak seperti halnya aksi penghancuran Israel atas instalasi nuklir Irak tahun 1981. Ketiga, keberhasilan serangan AS atas Irak, akan membuka jalan bagi serangan AS-Israel terhadap Hezbollah di Lebanon, gerakan perlawanan Palestina dan Suriah. Dengan mengkalkulasi untung dan rugi diatas Sikap Iran terhadap Invasi AS ke Irak tahun 2003 adalah netral secara militer dalam perang Irak-AS, meskipun Teheran menolak secara politik dan publikasi serangan militer AS itu.

Tetapi ada juga keuntungan yang diperoleh Iran jika AS menginvasi Irak yaitu karena dengan AS menginvasi Irak maka Rezim Saddam Hussein akan terguling. Dan AS sendiri tidak memperhitungkan sama sekali bahwa Iran akan mempengaruhi kelompok Syiah Irak untuk menggantikan posisi Saddam Hussein untuk memimpin negara Irak selanjutnya. Karena kelompok Syiah di Irak adalah mayoritas yaitu 60

E. Hipotesis

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan perumusan permasalahan di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sikap Iran terhadap invasi Amerika Serikat adalah menolak karena invasi ini berbahaya atau merugikan negara Iran dan akan menguntungkan negara Amerika Serikat.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan batas waktu sejak terjadi Invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi dengan judul "Sikap Iran Terhadap Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003" ini bersifat deskriptif analisis, yakni menjelaskan dan menganalisa permasalahan berdasarkan dari data dan informasi yang berhasil dikumpulkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yakni dengan menggunakan berbagai informasi, berita analisis, konsep-konsep hasil pemikiran para ahli yang dimuat dalam buku. Selanjutnya data juga diperoleh dari sumber lain seperti yang terdapat pada media cetak dan media elektronik, baik majalah-majalah, koran-koran, jurnal-jurnal, artikel, internet dan sumber lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika penulisan. Keseluruhan tulisan ini akan dibagi menjadi lima Bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Merupakan Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Maksud Dan Tujuan Penulisan, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesis, Jangkauan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Berisi tentang Dinamika hubungan Iran-Irak-Amerika Serikat sejak Perang Teluk I sampai dengan tahun 1991.

Bab III :. Berisi tentang Latar Belakang Invasi Amerika Serikat Ke Irak Tahun 2003.

Bab IV: Berisi tentang Keuntungan dan kerugian Iran Atas Invasi Amerika Serikat Ke Irak tahun 2003.

Bab V : Berisi tentang kesimpulan, ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, isinya berupa kesimpulan dari bahasan-bahasan sebelumnya yang merupakan